

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat, dan di lingkungan kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan. Usaha untuk mendata keadaan sesungguhnya mengenai perempuan di seluruh dunia menghasilkan beberapa statistik yang mengejutkan tentang perbedaan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan merupakan golongan mayoritas dari orang miskin di dunia dan jumlah perempuan yang hidup di desa-desa miskin telah meningkat 50 persen sejak tahun 1975. Perempuan merupakan mayoritas penyandang buta huruf di dunia, jumlahnya meningkat dari 543 juta menjadi 597 juta antara tahun 1970 sampai 1985. (Sumber: *The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics* (penerbitan PBB, No.E.90.XVII.3).

Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka

dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki. Pada tanggal 12 Juli 1963 timbul gerakan global yang dipelopori gerakan kaum perempuan yang berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC) No. 861 F (XXVI) dan diakomodasi pemerintah Indonesia pada tahun 1968. Untuk mewadahi perjuangan tersebut dibentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia dengan SK Menteri Negara Kesra No. 34/KPTS/Kesra/1968. Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan *World Conference International Year of Women* PBB yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu dikembangkan berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment Programs*). Guna mewadahi aktifitas tersebut, maka diperkenalkan era perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) yang disingkat dengan WID, yang bermaksud mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan. Pada tahun 1980 di Kopenhagen dilakukan *World Conference UN Mid Decade of Women*, yang mengesahkan tentang *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Cedaw), merupakan konvensi tentang peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1984. Pada pertemuan itu dari Indonesia dihadiri oleh Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Tahun 1985 di Nairobi, diadakan *World Conference on Result on Ten Years Women Movement*, yang menghasilkan *The Nairobi Looking Forward Strategies for the Advancement of Women* yang bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. PBB pada

tahun 1985 membentuk satu badan yang disingkat UNIFEM (*the United Nations Fund for Women*) untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi, dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Berdasarkan berbagai studi maka tema WID (*Women in Development*) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi pendekatan WAD atau (*Women and Development*) atau perempuan dan pembangunan. Kata dalam diganti dengan kata dan yang memberi makna bahwa kualitas atau mutu kesertaan lebih penting daripada sekedar kuantitas atau jumlah.

Pada tahun 1990 di Vienna diselenggarakan *the 34 th Commission on the Status of Women* dilakukan analisis terhadap konsep pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kaum laki-laki nampaknya kurang membawa hasil seperti yang diharapkan. Dari studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu dipergunakanlah pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan *Gender and Development (GAD)*, suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau sebaliknya. (Sumber : Bunga Rampai, 2003).

Pendidikan Untuk Semua biasa disebut PUS atau *Education for All (EFA)*, merupakan suatu gerakan untuk mengaitkan dan mensinergikan berbagai program pendidikan yang telah ada yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait seperti aparat pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat luas seperti organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai sebuah komitmen global atau lebih dikenal dengan Kerangka Aksi Dakar 2000.

Kerangka Aksi Dakar tersebut menegaskan visi Deklarasi Dunia tentang PUS. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Deklarasi Dakar 2000, gerakan PUS secara nasional baru dicanangkan oleh Presiden pada 23 Juli 2004 pada puncak acara Hari Anak Nasional 2004 atau empat tahun selepas komitmen Dakar dipertegas.

Pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan dengan berbagai upaya telah mencapai tahap yang cukup berarti, namun masih jauh dari harapan. Hal itu dapat dilihat dalam pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dasar, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Sesuai amanat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, agama, dan gender. Amanat pembukaan UUD 1945 tersebut secara politis menjamin sistem penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air.

Perjuangan perempuan di bidang pendidikan telah dimulai semenjak zaman penjajahan. Pergeseran posisi perempuan menjadi posisi yang lebih rendah dari laki-laki terjadi akibat feodalisme yang berkembang di zaman Mataram dan menempatkan istri sebagai lambang status kaum pria, sebagai pelayan suami, dan menggeser kedudukan perempuan dari sebagai subyek menjadi obyek. Kondisi ini mengusik Raden Ajeng Kartini, seorang priyayi anak Bupati Rembang yang selanjutnya menuangkan keprihatinannya akan nasib perempuan bangsanya

tersebut dalam surat-suratnya yang dikirimkan kepada sahabatnya berbangsa Belanda. Surat tersebut kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang." Di Jawa Barat, Raden Dewi Sartika (1884-1947) yang mempunyai pemikiran untuk meningkatkan kecakapan hidup kaum perempuan di tatar Sunda. Pada tahun 1904 berdiri Sakola Istri (sekolah gadis) di Bandung, merupakan sekolah pertama untuk jenisnya di Indonesia bertempat di Paseban Kabupaten Bandung (Wariatmadja, 1980/1981:77-79).

Seorang penulis terkenal Sutan Takdir Alisyahbana pada tahun 1936 telah menulis buku yang berjudul layar terkembang. Buku tersebut menceritakan tentang perjuangan perempuan dalam pendidikan dan emansipasi wanita. Diceritakan Tuti dan Maria adalah dua orang bersaudara yang mendapat pendidikan menengah. Pada suatu kesempatan Tuti mulai terbuka dalam memandang kehidupan di pedesaan, keadaan tersebut benar-benar telah menggugah alam pikiran Tuti. Pandangannya seputar pergerakan kaum perempuan beserta sikap yang harus dimilikinya dan kedudukannya dalam masyarakat, kaum perempuan dipandang sebagai kaum yang harus memiliki kesamaan derajat dengan kaum laki-laki. (STA, 1995).

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, di Provinsi Jambi terdapat beberapa Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu: Suku Kubu, Suku Bajau, dan Talang Mamak. Dari ketiga komunitas adat terpencil itu yang paling banyak adalah Suku Kubu atau Suku Anak Dalam. Karena suku ini tinggalnya di dalam hutan, maka sebagian orang menamakannya Orang Rimba. Orang Rimba yang di dalamnya terdapat Perempuan Rimba memiliki kondisi sosial budaya masyarakat

yang masih tertinggal. Suku ini menyebar di seluruh wilayah hutan dan sebagian ada juga yang menempati wilayah hutan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Propinsi Jambi.

Dasar pemikiran untuk melakukan penelitian tentang strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba ini antara lain: pertama, dari HAM (Hak Asasi Manusia) ada temuan bahwa kaum perempuan adalah individu yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki; kedua, negara Indonesia sudah mempunyai kebijakan untuk mengimplementasikan pemerataan dan meningkatkan akses atas pelayanan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tentang wajib belajar pendidikan dasar dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; ketiga, informasi tentang realita di Provinsi Jambi khususnya di wilayah TNBD tingkat pendidikannya masih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang berdekatan wilayahnya; keempat, kenyataan di lapangan sudah ada beberapa upaya baik dari pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat namun pemberdayaannya masih bersifat global belum fokus pada pemberdayaan perempuan; kelima, pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini belum menyentuh pada kebutuhan dasar masyarakat Orang Rimba sehingga banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Ada banyak permasalahan yang teridentifikasi dan selanjutnya memotivasi peneliti pada saat dilakukan observasi awal di TNBD. Dari observasi awal tersebut, ditemukan ada enam kelompok belajar pendidikan alternatif yang telah dilaksanakan di wilayah TNBD. Kelompok belajar atau rombongan tersebut antara

lain: Sungai Kejasung Besar dengan Rombongan Meladang; Sungai Kejasung Kecil dengan Rombongan Melayu Tuha; Sungai Semapui, Air Hitam dengan Rombongan Angka-angka; Sungai Toruyan, Air Hitam dengan Rombongan Ninjau; Sungai Aebahan dengan Rombongan Merantai; dan Sungai Singosari dengan Rombongan Gerak. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Orang Rimba yang Mengikuti Pendidikan Alternatif**

No	Rombongan	Tempat	Anak Didik	Keterangan
1	Meladang	Kejasung Besar	29	L = 26, P = 3
2	Melayu Tua	Kejasung Kecil	20	L = 17, P = 3
3	Angka-angka	Semapui Air Hitam	22	L = 20, P = 2
4	Ninjau	Toruyan Air Hitam	18	L = 16, P = 2
5	Meranti	Aebahan	17	L = 16, P = 2
6	Gerak	Singosari	18	L = 16, P = 2
	JUMLAH		124	L = 110, P = 14

Sumber: KPA Sokola 2009

Bukti atau fakta nyata yang menjadikan masalah ini adalah tingginya buta aksara dan angka pada Orang Rimba, dari populasi 1316 jiwa Orang Rimba baru sekitar 124 jiwa yang sudah bisa baca, tulis, hitung. Jumlah dari enam kelompok belajar di atas sebagian besar peserta belajarnya adalah laki-laki, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyangkut adat-istiadat yang berlaku pada kehidupan Orang Rimba.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah tentang:

*”Bagaimana strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan perempuan dengan pendekatan konvensional pada Perempuan Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi kurang berhasil?”*

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka permasalahan tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang merupakan pedoman kerja dalam penelitian, dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa profil eksternal pendidikan dilihat dari aspek geografis, demografis, ekonomis, sosial, dan budaya berpengaruh terhadap pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi? (2) Mengapa profil internal pendidikan kaitannya dengan keadaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan berpengaruh terhadap pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi? (3) Bagaimana pandangan masyarakat Orang Rimba terhadap pendidikan di TNBD Jambi? (4) Bagaimana peran Perempuan Rimba kaitannya dengan pendidikan di TNBD Jambi? (5) Bagaimana strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi? (6) Faktor-faktor strategis apakah yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengelolaan pendidikan untuk pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi? (7) Bagaimana dampak dari strategi pengelolaan pendidikan terhadap pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi pengelolaan pendidikan dalam pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi. Sebelum dapat merumuskan alternatif strategi tersebut, terlebih dahulu diperlukan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan khusus berikut ini, karena itu penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan secara empirik tentang profil eksternal pendidikan yang berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada pendidikan berbasis budaya lokal.
2. Mendeskripsikan secara empirik tentang profil internal pendidikan kaitannya dengan keadaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan.
3. Mendeskripsikan secara empirik tentang pandangan masyarakat Orang Rimba terhadap pendidikan.
4. Mendeskripsikan secara empirik tentang peran Perempuan Rimba kaitannya dengan pendidikan.
5. Mendapatkan gambaran tentang strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba.
6. Mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor strategis dalam pengelolaan pendidikan untuk pemberdayaan Perempuan Rimba.
7. Merekomendasikan alternatif model pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal dalam pemberdayaan Perempuan Rimba di TNBD Jambi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai deskripsi tentang strategi pengelolaan pendidikan dalam pemberdayaan Perempuan Rimba yang disajikan sebagai rujukan akademis, pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengetahuan umum bagi masyarakat.
- b. Sebagai bahan kajian pada teori-teori tertentu kepada pendidikan lain, khususnya dalam bidang pendidikan alternatif bagi Komunitas Adat Terpencil.
- c. Sebagai bahan untuk dijadikan obyek studi lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pembantu pembuat kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang memerlukan.
- b. Agar dapat diketahui apa yang dapat diinginkan dan diperlukan Orang Rimba dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan dapat dicari solusinya sehingga terjadi harmonisasi dalam kehidupan Orang Rimba dan dapat meningkatkan sumber daya Perempuan Rimba.
- c. Agar masyarakat luas khususnya masyarakat Jambi, mereka dapat memahami Perempuan Rimba sebagai bagian dari masyarakat Indonesia

yang belum beruntung sebagaimana masyarakat lainnya dalam hal menikmati pembangunan bangsa.

- d. Bagi calon pendidik sebagai masukan agar dapat mengetahui pola pembelajaran yang tepat untuk diterapkan bagi masyarakat Orang Rimba.
- e. Bagi peneliti dan pembaca penelitian ini sebagai masukan positif dan informasi yang bermanfaat bagi bidangnya masing-masing.

#### **E. Premis Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini penulis kemukakan premis penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji, memaknai, dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan pendidikan, guna merumuskan model strategis pengelolaan pendidikan pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah TNBD.

Sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas pemerintah dalam bidang pendidikan adalah mewujudkan terciptanya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Selain itu, pendidikan nasional juga harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia atau peserta didik dengan mengembangkan potensi dirinya dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Pembangunan SDM tersebut bersifat menyeluruh, terpadu, dan harus bersifat adil terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan efisiensi. Tantangan pembangunan pendidikan dalam tingkat implementasi ada tiga hal, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang terkait dengan efisiensi manajemen pendidikan. Oleh karena itu proses pendidikan harus dilakukan secara berjenjang, dari jenjang sekolah dasar sampai dengan ke jenjang perguruan tinggi.

Pendidikan dalam arti luas tidak terbatas hanya pada sistem persekolahan saja, akan tetapi meliputi segala upaya yang menyangkut transformasi nilai dan kemampuan yang berlangsung dalam proses interaksi antar individu dalam sistem sosial. Nilai-nilai dan kemampuan yang ditransformasikan tersebut merupakan kristalisasi budaya yang dianggap terbaik dan diperlukan bagi kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan individu, masyarakat, bangsa, dan bahkan penduduk dunia (Satori, 2000:2).

Dalam masyarakat modern, pendidikan diberi peranan yang sangat dinamis. Pendidikan diarahkan untuk mengubah dan mengembangkan nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan yang baik diukur dari nilai tambah yang dirasakan dan didapat oleh individu, masyarakat atau bangsa dalam

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, beban tambahan yang diberikan kepada pendidikan adalah bahwa pendidikan masih diharapkan mampu mengubah atau bahkan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dalam konteks ini pendidikan diharapkan dapat melakukan intervensi untuk membuka jendela kehidupan masyarakat melalui upaya pembekalan kemampuan dasar (*coping skills*) yang diperlukan oleh setiap individu dalam konteks dan kondisi masyarakat di mana mereka berada.

Seperti diungkapkan Makmun (2000:2) bahwa:

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pendidikan dipandang sebagai bagian atau merupakan salah satu sektor dalam sistem pembangunan kewilayahan. Dalam fungsi ini pendidikan mencakup: (1) upaya untuk melaksanakan wajib belajar, (2) memenuhi tuntutan politik dan aspirasi masyarakat, (3) upaya membina, kepribadian, (4) upaya untuk menguasai dan mengembangkan iptek, (5) upaya penyiapan tenaga kerja, (6) upaya peningkatan sumber daya manusia seutuhnya, dan (7) upaya pendidikan untuk transformasi kebudayaan. Dalam memenuhi fungsi-fungsi tersebut, upaya pembangunan pendidikan hendaknya memenuhi tuntutan akan (1) pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, (2) terwujudnya layanan dan hasil yang bermutu, (3) adanya kesesuaian antara produk atau *output* pendidikan dengan tuntutan masyarakat, dan (4) terjadinya pengelolaan pendidikan yang efisien, yaitu pengelolaan pendidikan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai produktivitas yang optimal.

Dari pendapat di atas, pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan transformasi kebudayaan. Dalam upaya pembangunan pendidikan hendaknya memenuhi tuntutan akan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya Perempuan dan terjadinya pengelolaan pendidikan yang dapat memanfaatkan sumber

daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal.

## **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Secara umum paradigma adalah cara kita melihat dunia bukan dengan tindakan melihat, melainkan dengan tindakan mempresepsi, mengerti, menafsirkan. Kita melihat dunia, bukan sebagai dunia adanya melainkan sebagai kita adanya. Selain itu, Lincon dan Guba (1985:15) mengemukakan bahwa paradigma merupakan distilasi atau penyulingan dari apa yang kita pikirkan tentang dunia tetapi tidak membuktikannya. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan bahwa paradigma adalah seperangkat asumsi, konsep atau proposisi yang diyakini kebenarannya. Sedangkan Moleong (1989:33-34) mengatakan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, konsep atau proposisi, nilai atau pola pandangan mendasar tentang sesuatu pokok permasalahan yang akan mengarahkan peneliti. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah seperangkat kepercayaan, nilai, konsep, dan pandangan tentang alam sekitar yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk merumuskan dan memecahkan permasalahan penelitian. Dengan demikian paradigma penelitian merupakan pegangan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

Kerangka pikir penelitian ini secara paradigmatik disajikan pada gambar 1.1 di bawah ini. Paradigma ini dikembangkan beranjak dari beberapa pemikiran teoritik sebagai berikut:

Pertama, bahwa Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas. Karena pendidikan adalah wahana yang paling tepat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdampak pada peningkatan hidup masyarakat.

Kedua, merencanakan pada dasarnya merupakan kegiatan memikirkan masa depan yang lebih baik yang menggambarkan terjadinya perubahan-perubahan yang diinginkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dalam proses perencanaan, kondisi perubahan yang diinginkan tersebut perlu dirumuskan secara operasional, yang menyangkut substansi perubahan, sifat perubahan, berapa banyak, dan kapan harus dicapai.

Ketiga, strategi pengelolaan pendidikan merupakan suatu interpretasi umum tentang sekumpulan fenomena yang berhubungan dan relevan dengan pengelolaan pendidikan. Strategi secara sempit memiliki kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara luas, strategi diartikan sebagai cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan termasuk dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan proses evaluasi. Ketepatan strategi yang digunakan akan memberi kemudahan dalam pencapaian tujuan dan sebaliknya kesalahan dalam pemilihan strategi akan menyulitkan dalam pencapaian tujuan. Definisi ini menunjukkan bahwa ada suatu fenomena tentang strategi pengelolaan pendidikan terhadap upaya pendidikan khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan. Kegiatan pengelolaan pendidikan semacam itu sesungguhnya berlangsung pula dalam suatu

proses pendidikan karena dalam proses tersebut memerlukan pengaturan berbagai sumber daya personal maupun material atau dengan kata lain dalam proses itu berlaku juga kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif.

Keempat, sasaran menyangkut hasil-hasil yang diinginkan, yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran merupakan suatu nilai, perubahan, atau keadaan yang diinginkan oleh lembaga. Sasaran merupakan bagian dari suatu tujuan dasar secara lebih konkrit.

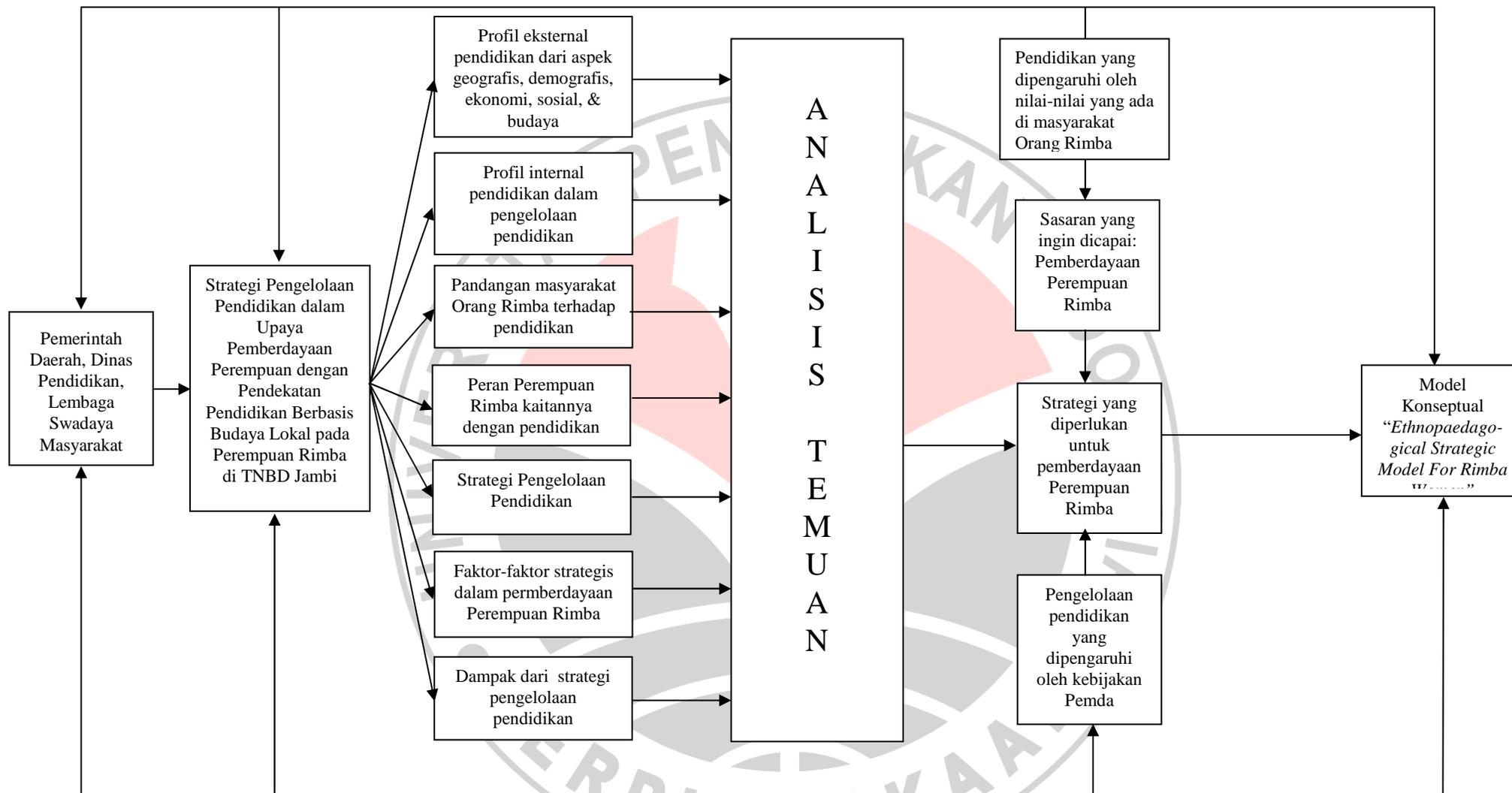
Kelima, pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Dalam strategi pengelolaan pendidikan agar berhasil dengan baik harus memperhatikan dan mengadopsi nilai-nilai yang ada pada masyarakat ke dalam proses belajar mengajar.

Keenam, pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya-upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan secara kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ketujuh, pendidikan berbasis budaya lokal dapat mereduksi atau menghilangkan disfungsi yang selama ini menjadi persoalan pendidikan. Selain itu dapat menjadi kekuatan dalam proses pemberdayaan masyarakat menuju kearah fungsionalisasi hasil dan dampak pembelajaran bagi kehidupan masyarakat setempat. Landasan dan pendekatan tidak berarti bermakna sempit akan tetapi

bertumpu dari kekuatan budaya lokal berorientasi ke arah yang luas. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat dituntut memiliki kemampuan dalam hal mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia. Upaya yang harus dilakukan adalah tetap menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga kelestarian budaya dapat terpelihara.





**Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian**

Ket: → = Hubungan searah  
 ↔ = Hubungan timbal balik